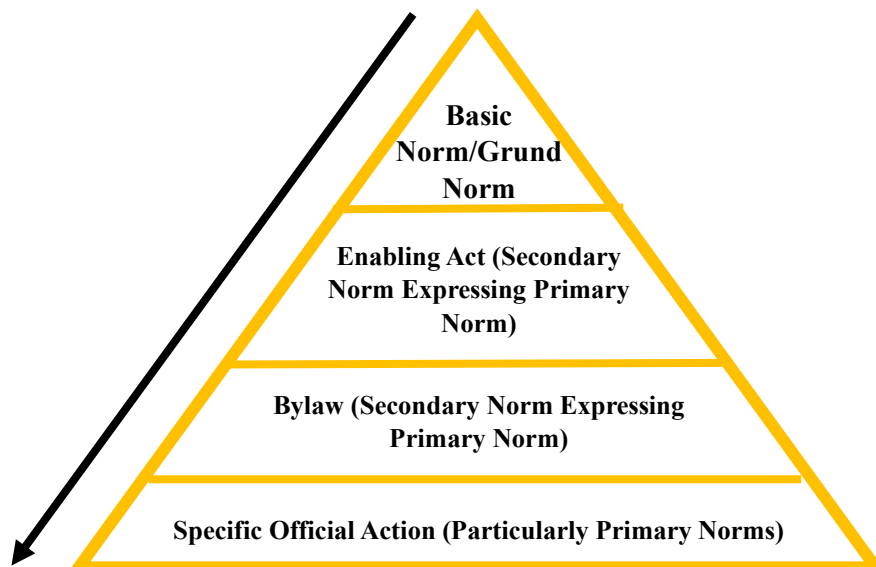
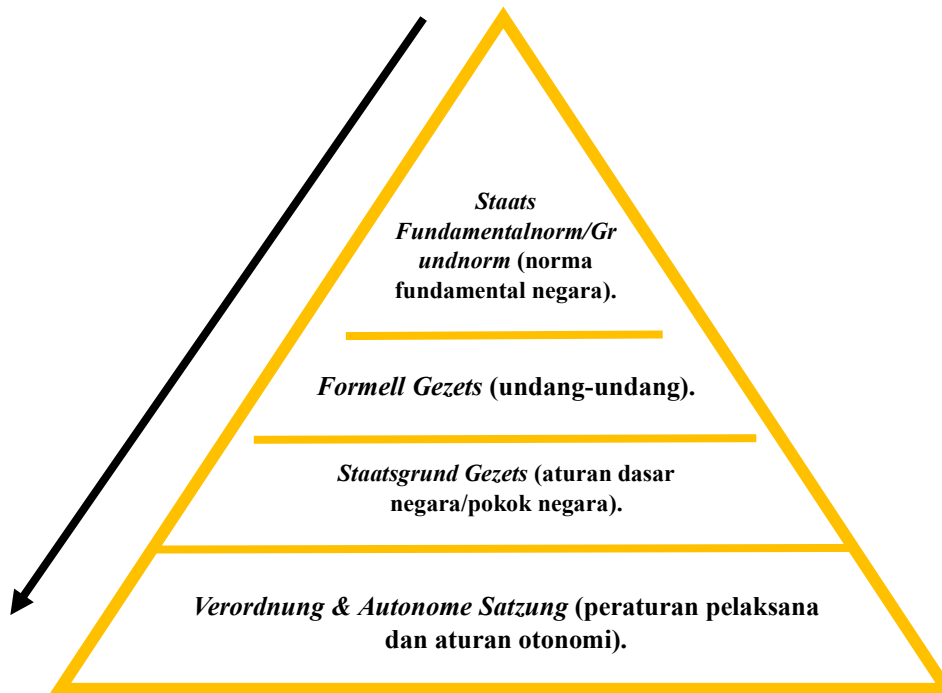


No	Daerah Khusus	Peraturan	Istilah Peraturan Daerah
1.	Papua	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Perdasus
2.	Nanggroe Aceh Darussalam	Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006	Qanun
3.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Perdais
4.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Perda

### Teori “*Stufenbau*” Hans Kelsen



## Penyempurnaan Teori “*Stufenbau*” Hans Nawiasky



## Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 1966-2011

No	Perbandingan jenis	Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
1.	<b>TAP MPRS No. XX/MPRS/1966</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar 1945</li> <li>2. Ketetapan MPR RI</li> <li>3. Undang-Undang/Peraturan</li> <li>4. PemerintahPengganti Undang-Undang (Perpu)</li> <li>5. Peraturan Pemerintah</li> <li>6. Keputusan Presiden</li> <li>7. Peraturan peraturan pelaksana lainnya Seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri</li> <li>• Instruksi Menteri</li> </ul> </li> </ol>
2.	<b>TAP MPR No. III/MPR/2000</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar 1945</li> <li>2. Ketetapan MPR RI</li> <li>3. Undang-Undang</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)</li> <li>5. Peraturan Pemerintah</li> <li>6. Keputusan Presiden</li> <li>7. Peraturan Daerah</li> </ol>
3.	<b>UU Nomor 10 Tahun 2004</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti</li> <li>3. Undang-Undang (Perpu)</li> <li>4. Peraturan Pemerintah</li> <li>5. Peraturan Presiden</li> <li>6. Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Provinsi</li> <li>• Perda Kab./Kota</li> <li>• Peraturan Desa</li> </ul> </li> </ol>
4.	<b>UU Nomor 12 Tahun 2011</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945</li> <li>2. Ketetapan MPR RI</li> <li>3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Presiden;</li> <li>6. Peraturan Daerah Provinsi; dan</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>

#### Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

No	Peraturan Kepala Otorita IKN	Tanggal Ditetapkan	Sumber
1.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara	9 September 2022	Berita Negara Tahun 2022 Nomor 894
2.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat	20 Februari 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 300
3.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu	20 Februari 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 301

4.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2	20 Februari 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 302
5	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Selatan	19 Juni 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 496
6.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Utara	19 Juni 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 497
7.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simpang Samboja	19 Juni 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 492
8.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kuala Samboja	19 Juni 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 493
9.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah	19 Juni 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 500

	Perencanaan Muara Jawa		
10.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara	03 Juli 2023	Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 501
11.	Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pegawai dalam Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara	1 Agustus 2023	Berita Negara Tahun 2023 Nomor 587

### Perbedaan Pembentukan Peraturan Daerah & Perka Otorita

No	Prosedur Pembentukan	Proses Pembentukan Peraturan Daerah	Proses Pembentukan Perka Otorita
1.	Prosedur Perencanaan	Prosedur perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda, yang diartikan sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, pemrakarsa Peraturan Daerah (dapat oleh DPRD ataupun Kepala Daerah) yang mana kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD.	Dalam proses perencanaan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak memiliki DPRD, maka perencanaannya diprakarsai oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara secara langsung serta kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
2.	Prosedur Penyusunan	Prosedur penyusunan berisikan pembahasan mengenai pengkajian hukum dan hasil penelitian	1. Prosedur penyusunan "Perka Otorita" Tidak ada Naskah Akademik, melainkan dalam prosedur

		lainnya (Naskah Akademik) terhadap rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.	penyusunannya, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyusun rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 2. Dalam tahapan penyusunan Perka Otorita Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengikutsertakan kementerian dan/atau lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/ atau pihak lain yang memahami substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
3.	Prosedur Pembahasan	Prosedur Pembahasan Peraturan daerah dibahas langsung oleh DPRD dengan Kepala Daerah dengan Tingkat I & II.	Mengingat Otorita Ibu Kota Nusantara tidak memiliki DPRD, Maka dari segi pembahasannya Perka Otorita dibahas langsung oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara dengan berkoordinasi kepada Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Prosedur Penetapan	Prosedur penetapan peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.	Prosedur penetapan Perka Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
5.	Prosedur Pengundangan	Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Desa.	Peraturan Kepala Otorita adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

No	Bentuk Pengawasan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Penjelasan
1.	Konsultasi	Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
2.	Fasilitasi	Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
3.	Evaluasi	Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi

No	Bentuk Pengawasan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Penjelasan
1.	Fasilitasi	Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
2.	Verifikasi	Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
3.	Klarifikasi	Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.